



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Nak Dik, Penyidik Cari Tsk

**Dugaan Korupsi
DD Wayhawang**

KOTA BINTUHAN - Pengusutan kasus dana desa (DD), Desa Wayhawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur memasuki babak baru. Awal Januari ini, Unit Tipikor Satreskrim Polres Kaur akan menaikkan kasus ini dari penyelidikan (Lid) ke penyidikan (Dik). Ini lantaran kerugian Negara (KN) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah Rp 280 juta tidak dikembalikan oleh pihak yang bertanggung

jawab. Dengan naiknya kasus ini, maka dalam waktu dekat penyidik Polres Kaur akan melakukan pemeriksaan ulang untuk menentukan tersangka.

Dalam waktu dekat penyidik akan memanggil para saksi dan juga mantan Kades Wayhawang, Mi. Yang terlibat dalam pembangunan DD Wayhawang tahun 2017 yang lalu terkait pembangunan jalan sentra produksi di desa tersebut.

Kapolres Kaur AKBP Arief Hidayat, S.IK melalui Kasat Reskrim Iptu Ahmad Kairuman, M.Si membenarkan kalau kasus DD Wayha-

wang saat ini ditingkatkan statusnya dari lid ke dik. Dengan naiknya kasus ini maka pemeriksaan ulang akan segera dilakukan.

Untuk menentukan siapa saja yang terlibat dan bertanggungjawab atas kerugian negara sebesar Rp 280 juta tersebut.

"Awalnya kita minta mantan kades mengembalikan kerugian negara, namun sampai akhir tahun 2019 tidak juga ada pengembalian. Maka mulai hari ini (kemarin red) kasus ini kita tingkatkan ke tahap penyidikan. Siapa tersangkanya akan kita jerat dengan un-

dang-undang korupsi, siapa tersangkanya kita tunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut," kata Iptu Ahmad Kairuman.

Selain mantan kades, perangkat desa juga akan dimintai keterangan terkait penggunaan DD tahun 2017 sebesar Rp 750 juta tersebut. Penyelidikan kasus ini dilakukan pada awal tahun 2018 lalu. Setelah pihak Polres Kaur mendapatkan laporan dari warga. Pada awal tahun 2019, kasus DD Wayhawang dilakukan ekspos ke pihak Inspektorat oleh penyidik Tipikor. Sehingga Inspektorat dan

BPK turun melakukan audit. Setelah dilakukan audit pembangunan jalan sentral produksi tersebut diduga mengalami kerugian Rp 280 juta.

Pihak Inspektorat setelah LHP (laporan hasil pemeriksaan) keluar langsung meminta agar mantan kades mengembalikan kerugian negara. Tidak hanya itu LHP tersebut disampaikan ke PMD, Polres Kaur dan juga BKD Kaur. Setelah 60 hari lebih tanpa pengembalian kasus ini pun akhirnya dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan oleh pihak Polres Kaur. (cik)